

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Dwiyanto, 2021, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1983, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Disertasi Umpar, Bandung.
- Bagir Manan, Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dwika, 2011, *Keadilan dan Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Imam Syaukani, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, KDT, Jakarta.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Moenir, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mifta Thoha, 2016, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Kencana, cet II, Jakarta,
- Muh. Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ni'Matul Huda, Nazriyah, 2019, *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- , 2019, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Poerwasunata, W.J.S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Cet XII, Jakarta.
- Ridwan.H.R, 2003, *Hukum Administrasi NNegara*, UII Press,Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sukamto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi Dan Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Yogyakarta
- Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sastra Djatmiko dan Marsono, 2014, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Suseno, 2018, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wery Gusmansyah, 2017, *Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) dalam Perspektif Siyasah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, bandung.

B. Jurnal/ Artikel/ Karya Ilmiah

- A.A. Sahid Gataru, Fh, M.Si, 2008, *ILMU POLITIK MEMAHAMI DAN MENERAPKAN*. Edited by Tim Redaksi Pustaka Setia, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021).
- Afifah, Mughni Qoyyum, Ummi Maskanah, Riza Nurfadilah, and Puja Anisa. “Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wali Kota Bandung Yang Dilakukan Oleh Sekretaris Daerah,” no. 2023 (2024).

- Akbar, Muhammad, Rijalul Fikri, Muhammad Baharuddin, and Zubakhrum Tjenreng. "Manajemen Pelayanan Publik" 5, no. 1 (2025).
- Amir Lupito, 'Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Lex Administratum*, 2015.
- Aneta, Asna. "Model Dan Pendekatan Implementasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010).
- Arhdan, Sandy Mulia. "URGensi PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA TAHUN 2024 MENURUT PERATURAN" 5, no. 3 (2024).
- Arifin, Rusdan, Al Mugni, and Atep Abdurrafiq. "POLITIK HUKUM PENENTUAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI ACEH)" 1, no. 2 (2023).
- Bisnis, Jurnal Hukum, Alfani Aldi Pratama, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. "Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024," 2024.
- Budiardjo, Prof. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited by Pagut Lubis. Revisi 200. PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Chalil, Nur, Andi Safriani, Fadli Andi Natsif, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI" 1, no. 49 (2008).
- Dan, Walikota, and Bupati Oleh. "POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH" 11, no. 2 (2023). Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Depag RI, Jakarta, 2024.
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002).
- Djabbari, Muhammad Hidayat, B Irfan, Tri Cahyo Nugroho, and Erwing Yanto. "Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka" 10 (2024).

Edho Rizky Ermansyah, Asas-asas Hukum Administrasi Negara, *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2023.

Engkus, Ainyana Rachmadianty Azan, and Anisa Tiara Fitri, Alliadzar Hanif. "Buku Mewujudkan GG Melalui Pelayanan Publik." *Dialektika* 19, no. 1 (2021).

Fahlevy, Muhammad Reza, and Muhammad Hairul Saleh. "Eksistensi Birokrasi Di Era Revolusi 4.0 : Penggunaan Electronic Government Dalam Optimalisasi Pelayanan" 4, no. 1 (2023).

Fallahiyan, Muh Alfian, and Agung Setiawan. "Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821 / 5492 / SJ" 4 (2024).

Foulkes, *Instruction To Administrasi Law, Fourth Edition, Butterworths*, London, 1976.

Gandara, Moh, 'Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat', *Khazanah Hukum*, No.2, Vol.3, 2020.

Hamdillah, Hamdun. "Inovasi Pelayanan Publik Dan Transformasi Birokrasi : Pendekatan" 6, no. 2 (2023).

Hasan, Erliana. "Perilaku Komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kerja Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat." *Jurnal Tatapamong*, 2020.

Hasriani, Hasriani. "Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Jurnal Publisitas* 10, no. 2 (2024).

Ibad, Syahrul, 'Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik', *HUKMY: Jurnal Hukum*, No.1, Vol.1.

Idris, Rifqa Qur'ani, and Siti Aisyah. "Kesetaraan Gender Terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

Indara, Rona, and Kata Kumci. "Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum Dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" 8, no. 2 (2024).

Info, Article. "Regional Head in the Transition Period Before the Election

of 2024 Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024,” 2024.

Jum, A, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Surabaya, 2012.

Kennedy, Richard, Bonaventura Pradana Suhendarto, Fakultas Hukum, Universitas Katolik, and Soegijapranata Semarang. “Diskursus Hukum : Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi” 2, no. 2 (2020).

Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. “Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon.” *Governance*, 2021.

Martini, Rina. “BIROKRASI DAN POLITIK.” *Pendidikan*, 2012, 163.
Munandar, Ervin, Abdul Majid, Tunggul Anshari, and Setia Negara. “PROBLEMATIC AUTHORITY OF THE REGENT OFFICIAL IMPLEMENTATION IN STOPING VILLAGE HEAD,” no. 307 (2017).

Murtadho, A. “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu dan Kepala KUA dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara” *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 20, No. 1, 2021.

Nyoman, Ni, Wulan Prasintya, I Nyoman Putu, and Luh Putu. “Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik” 3, no. 3 (2021).

Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana, ‘Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014’, *EduYustisia*, No.2, Vol. 1, 2023.

Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana. “Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Abstrak” 2 (2023).

Putri, Nabila Mazaya, Program Studi, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Henny Marlyna, Program Studi, Magister Kenotariatan, and Universitas Indonesia. “Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya” 5 (2021).

Rahman, Abdul, and Dicky Mulya Ramdhani. “Implementasi Kebijakan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP UM Mataram* 10, no. 1 (2022).

- Rahmansyah, Arif, and Irwandi Irwandi. "Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021).
- Reniwuryaan, Alwi, Marthinus Johanes Saptanno, Vica Jillyan, and Edsti Saija. "Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional Indonesia" 1, no. 11 (2023).
- Rizky, Purnama Ayu. "Korupsi Dinasti Ratu Atut Dalam Pusaran Sejarah." Mata Mata Politik, 2020.
- Saepudin, A, 'Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia', *Balai Diklat Keagamaan Bandung*, 2016.
- Situngkir, Roman. "Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan Abstrak" 1, no. 23 (2022).
- Suharman, Edi. "PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA AUTHORITY OF PERSONNEL CONSTRUCTOR OFFICER IN THE APPOINTMENT OF MAIN LOCAL LEADER ACCORDING TO ACT NO . 5 OF 2014 ON STATE ' S CIVIL OFFICER," 2017.
- Sutan Rais Aminullah Nasution, Agusmidah, and Amsali Syahputa Sembiring, 'Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, No.1, Vol.1, 2022.
- Syafiq, Muhammad. "Birokrasi Di Era Revolusi (Studi Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia) 1, no. 1 (2019).
- Syauki, A, 'Aspek Hukum Penataan Jabatan Struktural Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.II, 2020.
- Telaumbanua, Nestiani, Odaligoziduhu Halawa, Eliagus Telaumbanua, and Delipiter Lase. "Analisis Perspektif Pegawai Tentang Kesetaraan Gender Dalam Menduduki Jabatan (Studi Kasus Pada Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias)." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 2 (2024).

Timumun, Rahmat Hidayat U, Fenti Prihatini, Dance Tui, and Rustam Tohopi. "Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menuju Desa Digital Di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin" 2, no. 9 (2024).

Tinjauan, Suatu, Tingkat Pendidikan, Aparatur Pemerintah, and Desa Ngadisuko. "Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Performance Of Village Government Apparatus In The Implementation Of Public Services To The Community" 15, no. 01 (2020).

Ulisah, Sri. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik(Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan Oleh Masyarakat." *Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016).

Ummah, Bikhusnil. "Peluang Pegawai Negeri Sipil Perempuan Dalam Pengisian Jabatan Struktural Di Pemerintah Kabupaten Lamandau , Kalimantan Tengah," 2014.

Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023)

Yahuda, Efron Lasa, and Tomy Michael. "Konstitusionalitas Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945" 2, no. 4 (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

-----, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

-----, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

D. Website

<https://kemenag.go.id/nasional/regulasi-baru-penyuluh-agama-kini-bisa-jadi-kepala-kua-a167P>, (diakses pada tanggal 11-November-2024).

<https://kemenag.go.id/nasional/catat-masa-jabatan-kepala-kua-hanya-empat-tahun-9f3yna> , (diakses pada tanggal 11-November-2024).